



Klaim Tak...

Bahkan DPRD Kota Jogja menyebut RS Jogja terancam bangkrut. Pimpinan Komisi D DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan wakil rakyat telah meminta keterangan BPJS Kesehatan.

Akhirnya diketahui BPJS belum bisa membayarkan klaim karena masih menunggu keputusan akhir auditor dari Kejangung dan BPK berkaitan status RS Jogja.

"Tunggakan utang ini khusus Maret dan April 2019 didasari oleh status quo RSUD Wirosaban [RS Jogja]. Pada waktu itu dikarenakan akreditasi rumah sakit yang harusnya bisa diselesaikan di Desember 2018, di mana dalam bulan tersebut proses akreditasi tidak bisa dilakukan karena Wali Kota [Jogja] belum menunjuk direktur RSUD yang baru," jelas Fokki dalam keterangannya.

Direktur RS Jogja, Ariyudi Yunita, mengatakan BPJS Kesehatan belum melunasi klaim Rp16 miliar ke RS Jogja. Namun ia memastikan keterlambatan tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan RS.

"Kami tidak terganggu pelayanannya, seperti biasa pelayanannya. Karena apa? Kami itu sudah disuntikan dana oleh Pemkot, APBD [perubahan] Pemkot yaitu sebesar Rp11,7 miliar," kata Ariyudi di RS Jogja, Kamis (1/8).

Kasus mandeknya klaim juga menimpa RSUD Panembahan Senopati Bantul. Tunggakan BPJS Kesehatan ke RS Panembahan Senopati mencapai Rp35 miliar. Bahkan untuk menutup kekurangan dana untuk menunjang operasional manajemen RSUD Panembahan Senopati Bantul terpaksa utang ke bank. Rencana berutang itu sudah mendapatkan lampu hijau Pemerintah Kabupaten Bantul.

Di RS Jogja, manajemen rumah sakit pada 16 Juli lalu telah mengajukan klaim untuk Mei dan Juni, meski saat ini masih dalam proses. Ariyudi telah mengajukan klaim Mei sebesar Rp3,3 miliar. Lalu untuk Juni yang diajukan sebesar Rp4,5 miliar. Sedangkan Rp16 miliar adalah untuk kebutuhan selama tiga bulan, Maret, April dan Mei. "Di April kami mengajukan tiga klaim," kata dia.

Kepala Bagian Keuangan, Analisa Data dan Pelaporan RS Jogja, Marvi Yunita, mengatakan kini dana talangan dari APBD Perubahan Kota Jogja 2019 sebesar Rp11,7 miliar tinggal menunggu persetujuan Gubernur DIY.

Jika disetujui tinggal menunggu penetapan di DPRD Kota Jogja. "Itu [dana talangan dari APBD Perubahan Kota Jogja 2019] kami alokasikan untuk beberapa belanja yang memang dominan seperti obat-obatan, seperti pembayaran gaji pegawai dan operasional yang lain," ujarnya.

Selain dana talangan, RS juga mendapatkan pemasukan dari pasien umum yang berobat.

Kemudian RS Jogja juga terbantu dengan adanya dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2018.

"Kami [juga] ada Silpa 2018 yang kami gunakan untuk menutup operasional selama belum ada aliran dana dari BPJS [Kesehatan], dan diperkirakan mencukupi sampai akhir tahun anggaran. Dana Silpa posisinya di [angka] Rp15,4 miliar," jelasnya.

Dengan berbagai dana yang tersedia, Marvi memastikan tidak ada layanan di RS Jogja yang terganggu. Sejauh ini, katanya, juga tidak ada keterlambatan pembayaran gaji pegawai di lingkungan RS Jogja. "[Gaji pegawai] aman," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi meminta RS Jogja terus berkomunikasi dengan BPJS. "Kami masih menunggu untuk BPJS memperoleh kesepakatan bersama terkait apa yang belum diselesaikan," katanya.

Heroe menambahkan tahun lalu, tunggakan BPJS mencapai Rp36 miliar. "Kalau Pemkot yang penting ada kejelasan supaya kalau memang perluantisipasi ya kita siapkan, karena rumah sakit tetap harus melayani," katanya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jogja, Dewi Hesti Yuniarti, mengatakan permasalahan RS Jogja hingga menyebabkan keterlambatan pembayaran dikarenakan pada Maret dan April rumah sakit tersebut belum memiliki akreditasi RS.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja)	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005